



DOKUMEN RANCANGAN AKHIR PERANGKAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2026

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA**



BPBDDKIJAKARTA



BPBDJAKARTA



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkenan-Nya Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 dapat disusun dengan baik.

Renja merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang disusun dengan memedomani Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2017 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah. Secara substansi, dokumen Rancangan Awal RKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 memuat hasil evaluasi Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kami sadari bahwa masih terdapat kekurangan yang membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan dalam perencanaan pembangunan, khususnya urusan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Oleh karena itu, rekomendasi yang konstruktif tetap akan menjadi masukan dalam identifikasi permasalahan pembangunan, arah kebijakan pembangunan, program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, penyelarasan dengan sasaran dan prioritas nasional, dan identifikasi program dan kegiatan menurut kewenangan Provinsi dan Kota/Kabupaten di masa yang akan datang.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan dokumen rancangan awal Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai kita semua.

Jakarta, 12 Agustus 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Dr. Drs. Isnawa Adh. M.A.P
NIP. 197205241992031002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	
Daftar Isi	i-1
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-2
1.2. Landasan Hukum	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan	I-4
1.4. Sistematika Penulisan	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	II-2
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-14
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	II-19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	III-2
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	III-3
3.3 Program dan Kegiatan	III-6
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	IV-1
BAB V PENUTUP	V-1

PENDAHULUAN

Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud & Tujuan, Sistematika Penulisan



1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunannya berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Renja sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Hal tersebut ditegaskan kembali dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang dalam pasal 15 Ayat (1) mengamatkan bahwa "Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah".

Proses penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Rancangan Awal RKPD Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD Tahun 2026. Selain itu juga dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun sebelumnya, Target Kinerja tahun 2025 dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 - 2026 dan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2028 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2044;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
17. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 Lampiran XXXV tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 296 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Data dan Informasi Kebencanaan;
19. Instruksi Sekretaris Daerah Nomor e-0003 Tahun 2025 Tentang Pendokumentasian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia, diperlukan pengaturan teknis dan pembagian jadwal subtahapan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI);
20. Surat Edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor e-0022/SE/2025 tentang Pedoman Teknis Pendokumentasian Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 ke Dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 disusun untuk mewujudkan target kinerja tahun 2026 dengan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam rencana operasional tahunan;
2. Menyediakan arahan/pedoman bagi aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026;

3. Menjadi alat ukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Masih Merujuk dengan dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, Prioritas Utama Pembangunan Tahun 2026 yaitu isu strategis terkait Penanggulangan Banjir dimana untuk tahun 2026 kegiatan Prioritasnya adalah :

1. Sosialisasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Provinsi (per jenis bencana).
2. Pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
3. Pelayanan dukungan psikososial dan JITUPASNA (Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana).
4. Pelayanan Jakarta Siaga *call center* 112
5. Program kelurahan tangguh bencana
6. Pengembangan sistem informasi kebencanaan

1.4 Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijabarkan penjelasan ringkas tentang Renja perangkat daerah, keterkaitan antara Renja dengan RKPD dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah, serta proses penyusunan Renja.

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Bab ini berisi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 (n-2) dan perkiraan capaian tahun 2025 (n-1); analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta; dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yang bersumber dari hasil Rembuk RW, usulan langsung masyarakat.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dijabarkan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi nama Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah, program dan kegiatan.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup yang terdiri atas catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024



2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan Capaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tentang evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan perkiraan capaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2025. Fungsi evaluasi ini adalah dalam rangka penyediaan informasi-informasi yang berguna untuk menentukan strategi dan kegiatan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026. Evaluasi atau reviu akan dilakukan terhadap realisasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 serta realisasi target sasaran Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2024. Selain itu juga akan dilakukan reviu terhadap pelaksanaan kegiatan tahun 2024 dan proyeksi realisasi anggaran tahun 2025.

Reviu hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 ditinjau dari capaian program dapat dilihat dalam Tabel 2.1.

Secara keseluruhan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2024 telah mengalokasikan pembiayaan seluruh program dan kegiatannya sebesar Rp. 137.922.531.823,- dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 129.327.437.908,- atau 93,77 %. Pada tahun 2024 terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- Program Penanggulangan Bencana BPBD memiliki 4 (empat) Kegiatan dan 13 (Tiga Belas) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BPBD memiliki 7 (Tujuh) Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan.
- Program Penanggulangan Bencana UPT PDIK memiliki 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT PDIK memiliki 6 (enam) Kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian Rencana Strategis Perangkat Daerah (sampai dengan Tahun 2025)

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
					6	7	8=(7/6)		10	11=(10/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
BPBD	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
BPBD	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan PB	1,08	0,92	0,92	100%	1	1	100%	
			Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
BPBD	1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	329	329	336	102%	6094	6094	100%	
BPBD	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan PB	6400	6787	9099	134%	6787	6787	324%	
BPBD	1.05.03.1.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	5	5	5	100%	5	5	100%	
BPBD	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan	5	1	1	100%	1	1	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana								
BPBD	1.05.03.1.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Dalam Melaksanakan Penanganan Awal Darurat Bencana	267	267	267	100%	267	267	100%	
BPBD	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	329	4520	4520	100%	2700	2700	100%	
	1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	4	1	1	100%	1 dokumen	1	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
					6	7	8=(7/6)		10	11=(10/5)	
	1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	8000	2000	2000	100%	2000	2000	100%	
	1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	267	1000	1267	126%	4000	4000	100%	
BPBD	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
					6	7	8=(7/6)		10	11=(10/5)	
BPBD	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	48	12	12	100%	12	12	100%	
BPBD	1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	4	1	1	100%	1	1	100%	
BPBD	1.05.03.1.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	379.912	29.884	29.884	100%	35000	35000	100%	
BPBD	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	
BPBD	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi	4	1	1	100%	1 dokumen	2	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun								
BPBD	1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah dokumen kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	4	1	1	100%	1 dokumen	1	100%	
BPBD	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
BPBD	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan Internal dan Eksternal Kantor, dengan nilai: 4 (persepsi sesuai PermenPAN)	4	4	4	100%	4	4	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
					6	7	8=(7/6)		10	11=(10/5)	
BPBD	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	62	62	62	100%	59	59	100%	
BPBD	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8	2	2	100%	2	2	100%	
BPBD	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	1	1	100%	1	1	100%	
BPBD	1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8	2	2	100%	2	2	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
BPBD	1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4	1	1	100%	1	1	100%	
BPBD	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
BPBD	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4	-	-	-	1	1	100%	
BPBD	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4	16	16	100%	7	7	100%	
BPBD	1.05.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	
BPBD	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau	4	3	3	100%	1	1	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Bangunan Lainnya yang Disediakan								
BPBD	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	4	4	4	100%	4	4	100%	
BPBD	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	76	14	14	100%	46	76	100%	
BPBD	1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	19	19	100%	25	25	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
					6	7	8=(7/6)		10	11=(10/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
UPT PDIK	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
UPT PDIK	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI									
UPT PDIK	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2	2	2	100%	4	4	100%	Target renstra dilaksanakan di tiap Triwulan
UPT PDIK	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	4	4	4	100%	4	4	100%	

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	3	2	2	100%	3	3	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	1	1	100%	1	1	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Yang Disediakan	2	1	1	100%	2	2	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan	2	1	1	100%	2	2	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material Yang Disediakan	2	1	1	100%	2	2	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	1	1	100%	4	4	100%	Target renstra dilaksanakan di tiap Triwulan
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	12	12	12	100%	4	4	100%	Target rencana kerja dilaksanakan di tiap Triwulan

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
					6	7	8=(7/6)		10	11=(10/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	1	1	1	100%	4	4	100%	Target renstra dilaksanakan di tiap Triwulan
UPT PDIK	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya Yang Disediakan	1	7	7	100%	52	52	100%	Target rencana kerja disesuaikan dengan jumlah unit sarpras yang disediakan UKPD
UPT PDIK	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik Yang Disediakan	1	1	1	100%	12	12	100%	Target renstra dilaksanakan tiap bulan

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Yang Disediakan	1	1	1	100%	4	4	100%	Target renstra dilaksanakan di tiap Triwulan
UPT PDIK	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	4	4	4	100%	4	4	100%	
UPT PDIK	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan Yang Dipelihara Dan Dibayarkan Pajak Dan Perizinannya	64	4	4	100%	5	5	100%	Target rencana kerja disesuaikan dengan jumlah KDO pada UKPD
UPT PDIK	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	100	68	108	158%	80	80	100%	Target rencana kerja disesuaikan dengan jumlah peralatan/mesin lainnya yang dipelihara UKPD
UPT PDIK	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan / Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
UPT PDIK	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase Kelurahan Yang Diberikan Informasi Rawan Bencana.	100	100	100	100%	100	100	100%	
UPT PDIK	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Dan Aparatur Di Kawasan Risiko Tinggi Bencana Lintas Kabupaten/Kota Yang Menerima Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi Rawan Bencana (Per Jenis Ancaman) Lintas Kabupaten/Kota	329	20	20	100%	1000	1000	100%	- Realisasi untuk mendukung capaian target rencana kerja Perangkat Daerah - Terdapat perubahan indikator kinerja sub kegiatan
UPT PDIK	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah aparat, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1600	35	35	100%	200	200	100%	Realisasi untuk mendukung capaian target rencana kerja Perangkat Daerah
UPT PDIK	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Warga Negara Termasuk Kelompok Rentan Dan Aparatur Di Kawasan Risiko	267	35	35	100%	200	200	100%	Realisasi untuk mendukung capaian target

Nama Perangkat Daerah	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rencana Strategis Perangkat Daerah) Tahun 2026	Target dan Realisasi Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024			Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025	Proyeksi Realisasi dan Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s.d tahun 2025		Ket
					Target Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024	Capaian (%)		Realisasi Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan s.d tahun 2025	Capaian Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/5)	12
			Tinggi Bencana Lintas Kabupaten/Kota Yang Meningkat Kemampuan Dan Ketrampilannya Dalam Pencegahan Dan Mitigasi Bencana								rencana kerja Perangkat Daerah
UPT PDIK	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana Yang Disusun Tepat Waktu	100	100	100	100%	100	100	100%	
UPT PDIK	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Dan Jenis Data Dan Informasi Kebencanaan Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	-	12	12	100%	12	12	100%	Sub kegiatan untuk mendukung pelaksanaan Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan oleh UKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. BPBD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang terdiri dari fase pra bencana, fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana dan fase pasca bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase prabencana/fase tidak terjadi bencana difokuskan untuk kegiatan pengurangan risiko bencana melalui pelatihan, pembinaan dan simulasi penanggulangan bencana bagi siswa dan masyarakat, relawan serta aparatur, serta penyediaan sarana prasarana *early warning system* melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), selain itu untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi BPBD menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dengan rekomendasi dari BMKG.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana difokuskan pada upaya untuk melakukan: respon cepat penanganan bencana 1x24 jam, pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya serta kebutuhan warga terdampak; koordinasi dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi warga terdampak.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada fase pasca bencana difokuskan pada 2 (dua) upaya yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi dengan cakupan pelayanan *assessment* penilaian kerusakan, pendampingan masyarakat melalui koordinasi pemulihan sosial dan ekonomi; pemulihan pelayanan kesehatan; pemulihan dan budaya; pemulihan fungsi pelayanan publik; serta mengkoordinasikan pembangunan kembali prasarana dan sarana.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya stabilitas dan ketahanan kota	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	0,53	0,58	0,63	0,68
2	Pemenuhan Pelayanan SPM Sub Urusan Bencana Dalam Rangka Meningkatkan Kapasitas Ketahanan Daerah	Persentase capaian SPM Sub Urusan Bencana	Persen	100	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Penyelenggaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 18 untuk memprioritaskan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar SPM sub urusan bencana sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal adalah 1) pelayanan informasi rawan bencana, 2) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, 3) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BPBD Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dan bekerjasama dengan SKPD/UKPD di Provinsi DKI Jakarta, kementerian dan lembaga, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan lembaga non pemerintah.

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam menghadapi, bertahan, dan pulih dari ancaman bencana. IKD mencerminkan tingkat ketahanan daerah terhadap bencana dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mendukung keberlanjutan pembangunan, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan kapasitas masyarakat serta pemerintah daerah.

IKD digunakan oleh pemerintah daerah, termasuk BPBD DKI Jakarta, sebagai acuan untuk mengidentifikasi area yang memerlukan prioritas penguatan kapasitas. Pengukuran IKD juga membantu dalam menyusun program kerja strategis untuk meningkatkan ketangguhan daerah terhadap bencana, mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan, dan menciptakan masyarakat yang lebih siap dan tangguh.

Terdapat 7 Prioritas pada pencapaian Indeks Ketahanan Daerah yaitu :

- a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan
- b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana
- f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Untuk memperoleh nilai IKD sebesar 0,63, BPBD melakukan kegiatan menyusun rancangan perda tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, merevisi peraturan gubernur tentang satuan pendidikan aman bencana, penyusunan pedoman pengkajian kebutuhan pascabencana (JITUPASNA), penyusunan dokumen pedoman rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, membuat Kajian Risiko Bencana, penyampaian Informasi Bencana kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, informasi dan edukasi, Peningkatan Kapasitas dan Simulasi Penanggulangan Bencana pada Fasilitas Publik dan Gedung, penanganan keadaan darurat serta pemberian logistik pada korban bencana.

Keberhasilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Strategis yang ditetapkan, tidak terlepas dari dukungan berbagai komponen, seperti sistem manajemen organisasi, sumberdaya anggaran, SDM/personil (termasuk profesionalisme), jaringan koordinasi dengan instansi terkait, peran serta masyarakat, serta prasarana dan sarana operasional.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BPBD diantaranya yaitu :

1. Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparatur dalam penanggulangan bencana yang disebabkan karakteristik masyarakat Jakarta yang heterogen.
2. Masih lemahnya sistem komando dilapangan untuk mengkoordinasikan penanganan darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi karena adanya ego sektoral instansi/lembaga.
3. Belum terintegrasinya sistem pelayanan penanggulangan bencana di seluruh SKPD teknis penanggulangan bencana.
4. Perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama pembangunan fisik dilaksanakan oleh SKPD terkait.
5. Masih minimnya sarana dan prasarana pengurangan risiko bencana.
6. Kurangnya SDM BPBD Provinsi DKI Jakarta baik dari segi kuantitas maupun kualitas dalam hal kemampuan kebencanaan.

BPBD juga mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDG's). Program SDG's yang didukung oleh BPBD terdapat pada tujuan yang ke 1 (satu), 13 (tiga belas) dan ke 17 (tujuh belas), dari 17 (tujuh belas) tujuan (Goals). Adapun target dan indikator sebagai berikut :

1. Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
2. Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
3. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
4. Pendampingan psikososial korban bencana
5. Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang beresiko tinggi
6. Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
7. Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk
8. Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
9. Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD terdapat tantangan dan peluang yang harus dihadapi, yaitu :

- Tantangan :

1. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko bencana dan pengurangan risiko bencana.

2. Terbatasnya kewenangan lembaga dan penggiat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana (belum terpenuhinya regulasi yang menjadi pedoman penggiat bencana untuk melaksanakan PB).
3. Kurang terpadunya penyelenggaraan penanggulangan bencana dan masih bersifat sektoral.
4. Masih rendahnya kemampuan petugas pada saat tanggap darurat dan pasca bencana.
5. Masih rendahnya pemahaman SKPD teknis dalam penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Belum sepenuhnya integrasi sistem informasi data.
7. Masih rendahnya kapasitas teknis aparat pemerintah penanggulangan bencana.
8. Belum memadainya fasilitas pendukung tempat evakuasi (tempat evakuasi yang tersedia di RPTRA masih sangat sederhana).
9. Belum seluruhnya pengelola gedung memahami pengurangan risiko bencana gedung bertingkat.
10. Sering terjadi pergeseran titik lokasi rawan bencana.

- Peluang

1. Perilaku masyarakat yang masih bersifat gotong royong dan mudah diarahkan.
2. Tingginya tingkat kepedulian dan kesadaran penggiat bencana dalam penanggulan bencana.
3. Potensi SKPD tentang tugas fungsi dan kewenangan sangat tinggi.
4. Tersedianya SDM dan APBD untuk peningkatan kapasitas aparat dalam penanggulangan bencana.
5. Adanya komitmen SKPD untuk melakukan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana.
6. Tersedianya APBD dan komitmen SKPD dalam mengintegrasikan sistem informasi data.
7. Tersedianya APBD dan SDM teknis aparat pemerintah penanggulangan bencana.
8. Kepedulian stakeholder dalam penanggulangan bencana pada pra, saat, dan pasca bencana.

9. Adanya update informasi pergeseran titik rawan bencana dari aparat kelurahan.

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BPBD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Gubernur Provinsi DKI Jakarta, capaian program nasional, tantangan dan peluang maka ditentukan isu-isu strategis BPBD Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

1. Koordinasi antar OPD dan Lembaga terkait penanggulangan bencana;
2. Rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pengurangan resiko bencana;
3. Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat terkait dengan penanggulangan bencana; dan
4. Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

TUJUAN & SASARAN PERANGKAT DAERAH

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan



3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1. Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044

Kebijakan Nasional yang menjadi salah satu rujukan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 adalah Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044.

Prioritas Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 yaitu:

- a. terwujudnya peraturan perundang-undangan yang harmonis di bidang penanggulangan bencana;
- b. terwujudnya kemandirian teknologi dan industrialisasi kebencanaan;
- c. terwujudnya kemudahan akses layanan peringatan dini terpadu multi ancaman;
- d. terwujudnya investasi yang memadai dalam pengurangan risiko bencana untuk ketangguhan;
- e. terwujudnya tata kelola risiko bencana yang sinergis antara pusat dan daerah;
- f. terwujudnya pemahaman terhadap risiko bencana, bentang alam, dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial dan ketahanan kesehatan masyarakat;
- g. terwujudnya penanganan darurat bencana secara cepat, efektif, dan terkoordinasi;
- h. terwujudnya penataan ruang dan permukiman serta perencanaan perkotaan yang terpadu terhadap ketahanan bencana dan adaptasi perubahan iklim, serta ketahanan sosial, dan ketahanan kesehatan masyarakat;
- i. terwujudnya perlindungan ekosistem laut dan pesisir yang berisiko bencana;
- j. tersedianya sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan profesional di bidang kebencanaan;
- k. terwujudnya pemulihan daerah terdampak bencana yang lebih baik, aman, dan berkelanjutan dengan memperhatikan pengurangan risiko bencana; dan
- l. terwujudnya infrastruktur yang berkualitas, andal, serta berkelanjutan dan tangguh bencana

Merujuk kepada prioritas tersebut, ada yang berkaitan secara langsung dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku pengemban urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada sub urusan kebencanaan BPBD selaku OPD pelaksana kewenangan penanggulangan bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta terutama

pada prioritas pembangunan manusia, bentuk penjabaran pelaksanaan prioritas meliputi :

- Pelayanan informasi rawan bencana provinsi.
- Peningkatan kemampuan dan penanganan kebencanaan bagi : warga masyarakat, aparat pemerintah serta siswa sekolah.
- Penguatan kapasitas dan Simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung.
- Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- Pendampingan Psikososial bagi masyarakat pasca Bencana.
- Peningkatan *early warning system* dan pelayanan kebencanaan.

2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs)

TPB/SDGs merupakan kerangka kerja pembangunan yang memiliki tiga dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan. TPB/SDGs diformulasikan ke dalam 17 Goals, 169 Target/Sasaran, dan 241 Indikator.

Gambar 3.1
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta memiliki keterkaitan erat terhadap 3 (tiga) tujuan dari 17 Tujuan TPB/SDGs yaitu tujuan “tanpa

kemiskinan”, tujuan “menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan” dan tujuan “mengambil tindakan cepat untuk perubahan iklim dan dampaknya”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka program/kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu :

- 1 Indeks Kesiapsiagaan Pelayanan Kebencanaan Daerah
- 2 Jumlah korban meninggal dan terkena dampak bencana
- 3 Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah
- 4 Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana
- 5 Pendampingan psikososial korban bencana
- 6 Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI)
- 7 Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)
- 8 Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan
- 9 Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 merujuk dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Adapun tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta seperti yang terdapat dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025-2029

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap Bencana	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,61	0,65	0,68	0,72	0.74
2.	Meningkatnya kapasitas ketahanan daerah terhadap Bencana	Terwujudnya Standar Pelayanan Minimal pada Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian SPM Sub Urusan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

		Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

Sebagaimana Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tabel 3.1 dan isu-isu penting yang perlu diselesaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada tahun 2026, maka prioritas kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada Tahun 2026 antara lain:

1. Pelayanan informasi rawan bencana provinsi.
2. Peningkatan kemampuan dan penanganan kebencanaan bagi warga masyarakat, aparatur pemerintah serta siswa sekolah.
3. Penguatan kapasitas dan Simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas publik dan gedung.
4. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
6. Pendampingan Psikososial bagi masyarakat pasca bencana.
7. Peningkatan early warning system dan pelayanan kebencanaan.

1.5 Program dan Kegiatan/Subkegiatan

Program Renja 2026 terdiri 1 (satu) program utama dan 1 program operasional. Program tersebut yaitu:

1. Program Penanggulangan Bencana
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pada tahun 2026 terdapat 2 (dua) program yaitu Program Penanggulangan Bencana dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut:

- Program Penanggulangan Bencana BPBD memiliki 4 (empat) Kegiatan dan 13 (tiga belas) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah BPBD memiliki 6 (enam) Kegiatan dan 18 (Delapan Belas) Sub Kegiatan.
- Program Penanggulangan Bencana UPT PDIK memiliki 3 (tiga) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan.
- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah UPT PDIK memiliki 4 (empat) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan.

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program prioritas RPD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPD, selanjutnya dijabarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Total Anggaran Perencanaan Akhir dari keseluruhan BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah Rp 101.091.371.058, dengan rincian Rp 96.064.061.062 dari BPBD dan Rp 5.027.309.996 dari Pusat Data dan Informasi Kebencanaan. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 beserta rencana pendanaannya terdapat dalam Tabel 3.3 yang menampilkan program, kegiatan, dan rencana anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan UPT Pusat Data dan Informasi Kebencanaan (UPT PDIK) BPBD Tahun 2026. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026
dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Perangka t Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
BPBD	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
BPBD	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGA N BENCANA	Persentase masyarakat dan aparatur yang dilatih dalam penyelenggaraan PB	Provinsi DKI Jakarta	1,08	60.866.313.296	APBD		1,08	60.866.313.296
			Persentase pendampingan yang dilaksanakan pada pasca bencana		100%				100%	
			Persentase pengungsi terlayani kebutuhan dasarnya dalam waktu 1 kali 24 jam		100%				100%	

Perangka t Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Persentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana.	Provinsi DKI Jakarta	100 persen	2.337.657.858	APBD		100 persen	2.337.657.858
BPBD	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/ Kota	Provinsi DKI Jakarta	6.094 Orang	2.337.657.858	APBD		6.094 Orang	2.337.657.858
BPBD	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	jumlah aparatur, relawan serta potensi masyarakat lainnya yang meningkat kapasitasnya dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Provinsi DKI Jakarta	7.075 orang	43.569.647.260	APBD		7.075 orang	43.569.647.260
BPBD	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Provinsi DKI Jakarta	6 Kawasan	1.003.585.000	APBD		6 Kawasan	1.003.585.000
BPBD	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan resiko bencana tinggi lintas kabupaten/kota yang terlibat gladi kesiapsiagaan mengetahui dan	Provinsi DKI Jakarta	3500 orang	471.439.648	APBD		3500 orang	471.439.648

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
			memahami mekanisme prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana							
BPBD	1.05.03.1.02.027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Jumlah Personil TRC Tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi dan kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Provinsi DKI Jakarta	60 Orang	2.009.527.459	APBD		60 Orang	2.009.527.459
BPBD	1.05.03.1.02.0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Provinsi DKI Jakarta	4.000 keluarga	10.743.552.024	APBD		4.000 keluarga	10.743.552.024
BPBD	1.05.03.1.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalikan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	25.711.666.689	APBD		1 Dokumen	25.711.666.689

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
			prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana							
BPBD	1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan resiko tinggi bencana lintas kabupaten/kota yang meningkat kemampuan dan keterampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Provinsi DKI Jakarta	7.075 Orang	3.250.063.520	APBD		7.075 Orang	3.250.063.520
BPBD	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	100%	9.856.099.360	APBD		100%	9.856.099.360
BPBD	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	678.674.872	APBD		12 Laporan	678.674.872
BPBD	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Provinsi DKI Jakarta	35.000 Orang	6.283.135.840	APBD		35.000 Orang	6.283.135.840

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.03.1.03.02	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Darurat Bencana	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	2.894.315.648	APBD		12 Laporan	2.894.315.648
BPBD	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	Provinsi DKI Jakarta	100%	2.328.020.698	APBD		100%	2.328.020.698
BPBD	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Provinsi DKI Jakarta	1 Dokumen	958.879.296	APBD		1 Dokumen	958.879.296
BPBD	1.05.03.1.04.0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga	Provinsi DKI Jakarta	28 Lembaga	742.660.608	APBD		28 Lembaga	742.660.608

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
			swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal							
BPBD	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Provinsi DKI Jakarta	60 Orang	626.480.794	APBD		60 Orang	626.480.794
BPBD	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN		Provinsi DKI Jakarta			APBD			

Perangka t Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
		DENGAN PELAYANAN DASAR								
BPBD	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		Provinsi DKI Jakarta			APBD			
BPBD	1.05.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Survey kepuasan terhadap pelayanan lingkungan Internal dan Eksternal Kantor, dengan nilai: 4 (persepsi sesuai PermenPAN)	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai	38.737.587.968	APBD		4 nilai	38.737.587.968
BPBD	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen	12.100.000	APBD		2 Dokume n	12.100.000
BPBD	1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi DKI Jakarta	2 Dokumen	12.100.000	APBD		2 Dokume n	12.100.000
BPBD	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan Administrasi Keuangan	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai	34.015.745.060	APBD		4 nilai	34.015.745.060

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Provinsi DKI Jakarta	80 Orang /Bulan	34.005.745.060	APBD		80 Orang/ Bulan	34.005.745.060
BPBD	1.05.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 dokumen	10.000.000	APBD		4 dokumen	10.000.000
BPBD	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai	176.374.822	APBD		4 nilai	176.374.822
BPBD	1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	176.374.822	APBD		2 Paket	176.374.822
BPBD	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai	3.158.629.726	APBD		4 nilai	3.158.629.726
BPBD	1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	95.586.058	APBD		1 Paket	95.586.058
BPBD	1.05.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	36.373.012	APBD		2 Paket	36.373.012
BPBD	1.05.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	256.884.780	APBD		2 Paket	256.884.780

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	5.253.360	APBD		1 Paket	5.253.360
BPBD	1.05.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	2.351.868.460	APBD		2 Paket	2.351.868.460
BPBD	1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	130.000.000	APBD		4 Laporan	130.000.000
BPBD	1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	153.493.953	APBD		12 Laporan	153.493.953
BPBD	1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Dokumen	129.170.103	APBD		4 Dokumen	129.170.103
BPBD	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 nilai	477.141.507	APBD		4 nilai	477.141.507
BPBD	1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
BPBD	1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	310.513.166	APBD		1 Paket	310.513.166
BPBD	1.05.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	6 Unit	166.628.341	APBD		6 Unit	166.628.341
BPBD	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	113.994.599	APBD		4 Nilai	113.994.599
BPBD	1.05.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	113.994.599	APBD		4 Laporan	113.994.599
BPBD	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks kepuasan kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Nilai	783.602.254	APBD		4 Nilai	783.602.254
BPBD	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	65 Unit	599.541.443	APBD		65 Unit	599.541.443
BPBD	1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	16 Unit	184.060.811	APBD		16 Unit	184.060.811

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
UPT PDIK	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
UPT PDIK	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
UPT PDIK	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Provinsi DKI Jakarta		2.125.880.340	APBD			2.125.880.340
UPT PDIK	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	177.101.288	APBD		4 Indeks	177.101.288
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	1 Paket	92.749.440	APBD		1 Paket	92.749.440
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	9.318.848	APBD		2 Paket	9.318.848

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	8.709.900	APBD		2 Paket	8.709.900
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	2 Paket	45.011.500	APBD		2 Paket	45.011.500
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	5.061.600	APBD		4 Laporan	5.061.600
UPT PDIK	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Provinsi DKI Jakarta	4 Laporan	16.250.000	APBD		4 Laporan	16.250.000
UPT PDIK	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	453.027.344	APBD		4 Indeks	453.027.344
UPT PDIK	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	-	-	-		-	-
UPT PDIK	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	599.652.256	APBD		4 Indeks	599.652.256

Perangkat Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
UPT PDIK	1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Provinsi DKI Jakarta	12 Laporan	599.652.256	APBD		12 Laporan	599.652.256
UPT PDIK	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.	Provinsi DKI Jakarta	4 Indeks	822.140.001	APBD		4 Indeks	822.140.001
UPT PDIK	1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Provinsi DKI Jakarta	5 unit	65.911.029	APBD		5 unit	65.911.029
UPT PDIK	1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi DKI Jakarta	150 Unit	756.228.972	APBD		150 Unit	756.228.972
UPT PDIK	1.05.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Provinsi DKI Jakarta		2.774.888.120	APBD		APBD	2.774.888.120
UPT PDIK	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Presentase kelurahan yang diberikan informasi rawan bencana	Provinsi DKI Jakarta	100 %	1.099.316.648	APBD		100 %	1.099.316.648
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparaturnya di kawasan risiko tinggi bencana	Provinsi DKI Jakarta	1.000 Orang	1.099.316.648	APBD		1.000 Orang	1.099.316.648

Perangka t Daerah	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiran Maju Rencana Tahun 2026	
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	3	4	5	6	7	8	9
		Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota							
UPT PDIK	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase jumlah dokumen penataan sistem dasar penanggulangan bencana yang disusun tepat waktu	Provinsi DKI Jakarta	100%	1.675.571.472	APBD		100%	1.675.571.472
UPT PDIK	1.05.03.1.04.0022	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Provinsi DKI Jakarta	12 Dokumen	1.675.571.472	APBD		12 Dokumen	1.675.571.472

PENUTUP

Pénutup Dokumen Renja



Dokumen Rancangan Akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah 2026 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2026. Renja merupakan penjabaran dari Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2023 - 2026. Fungsi Renja 2026 adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026. Selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasilan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Provinsi DKI Jakarta.

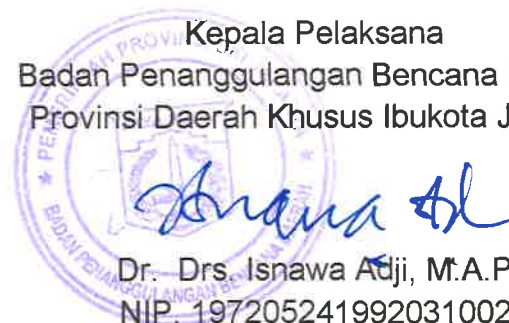
Namun demikian, proses perencanaan ini masih akan terus berlanjut melalui berbagai tahapan pembahasan dan penyempurnaan. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi bahan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang berlangsung dari tingkat kelurahan hingga tingkat provinsi. Selain itu, akan ada penjangkaran aspirasi melalui reses anggota DPRD serta proses pembahasan lainnya, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kebijakan pembangunan daerah.

BPBD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas dalam mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca-bencana melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta akademisi. Kolaborasi yang kuat diharapkan dapat menciptakan kebijakan dan program penanggulangan bencana yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dalam mendukung upaya penanggulangan bencana yang lebih efektif dan berdayaguna di DKI Jakarta.

Jakarta, 12 Agustus 2025

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Dr. Drs. Isnawa Adji, M.A.P
NIP. 197205241992031002